

B u l e t i n



PARLEMENTARIA

KETUA
Kopdes Hadir
untuk Rakyat

KOMISII
Bansos Jadi
Modal Judi

Bangkitkan Industri Tekstil Nasional

Nomor 1353/IV/VII/2025 Juli 2025



9 772614 339005



Bangkitkan Industri Tekstil Nasional



FOTO: GAL/ANA

Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025).

Komisi VII DPR RI menilai kebangkitan industri tekstil nasional harus dimulai dari dua kunci utama: penguatan pasar ekspor dan kemandirian produksi dalam negeri. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7), yang menyasar pelaku industri hingga lembaga pendidikan vokasi tekstil.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut penurunan tarif bea masuk produk tekstil Indonesia ke Amerika Serikat menjadi 19 persen harus dimanfaatkan sebagai peluang strategis untuk memperluas pasar ekspor. Menurutnya, produk lokal tetap diminati karena memiliki daya saing harga dan kualitas.

“Kalau produk Amerika masuk ke Indonesia, harganya pasti lebih mahal karena biaya produksi di sana

tinggi. Yang justru perlu diwaspadai adalah banjir produk murah dari

Tiongkok,” ujar Saleh.

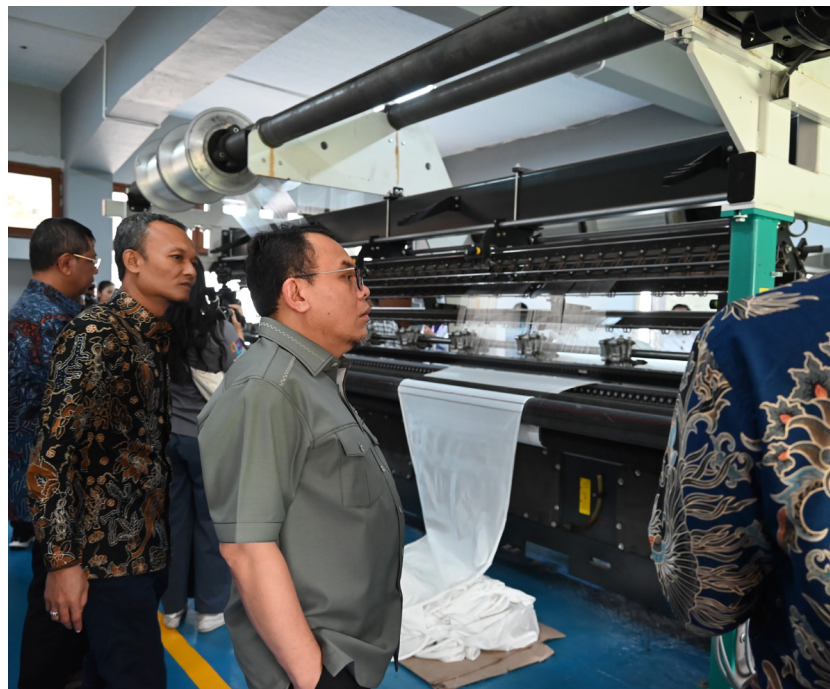
Ia menegaskan bahwa dalam era perdagangan bebas, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi pemain global. Karena itu, peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk harus disertai dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menekankan pentingnya kemandirian dari sisi hulu industri, termasuk pengembangan sumber daya manusia, teknologi tekstil, dan bahan baku serat khas Indonesia.

“Kita bisa bangkit jika kita mengembangkan pendidikan, ilmu, teknologi, dan bahkan memproduksi serat sendiri. Serat lokal itu bisa jadi kekuatan utama, bukan hanya untuk industri besar, tapi juga untuk UMKM,” tegasnya saat mengunjungi STTT Bandung.

Komisi VII berkomitmen memperkuat ekosistem tekstil nasional secara menyeluruh, dari riset dan pendidikan vokasi hingga perluasan akses pasar internasional.

gal/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Kopdes Hadir untuk Rakyat



Ketua DPR RI Puan Maharani saat peluncuran koperasi desa.

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang secara simbolis digelar di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran Kopdes ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terkait peluncuran Koperasi Merah Putih ini, Puan pun menegaskan pentingnya pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pupuk, hingga pemasaran hasil pertanian. Mantan Menko PMK ini menilai, Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya Pemerintah yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

“Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah Pemerintah yang

Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah Pemerintah yang mempraktikkan bahwa Negara hadir untuk rakyat.

mempraktikkan bahwa Negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah. Keberpihakan ini ditunjukkan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat,” lanjutnya, Senin (21/7).

Puan menyatakan, orientasi Pemerintah sejatinya memang harus memudahkan hidup rakyat. “Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi,” sebut Puan. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhaldid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefurroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moernoponi, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Insan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savanti Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Bansos Jadi Modal Judi

Fenomena mengejutkan terungkap dari hasil analisis transaksi keuangan nasional berupa lebih dari setengah juta penerima bantuan sosial (bansos) diduga menggunakan dana bantuan negara untuk berjudi secara daring. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut fenomena ini sebagai ironi besar dan peringatan serius atas rapuhnya sistem perlindungan sosial dan ekonomi rakyat.

“Pemerintah sudah berupaya keras menyalurkan bansos untuk membantu masyarakat miskin, tapi kalau dana itu justru digunakan untuk judi, ini bukan sekadar penyimpangan, tapi bisa merusak fondasi upaya pengentasan kemiskinan,” kata Sukamta usai memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7).

Perlu diketahui, data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis

Bansos seharusnya memperkuat perputaran uang di segmen terbawah, bukan dialirkan keluar negeri lewat judi. Ini merusak ekosistem ekonomi dan membahayakan tujuan bansos itu sendiri

Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sebanyak 571.410 penerima bansos melakukan transaksi judi online pada 2024. Total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp957 miliar hingga Rp1 triliun. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring investigasi yang melibatkan bank lainnya.

“Bansos seharusnya memperkuat perputaran uang di segmen terbawah, bukan dialirkan keluar negeri lewat judi. Ini merusak ekosistem ekonomi dan membahayakan tujuan bansos itu sendiri,” imbuhnya.

Selain aspek moralitas dan ekonomi, fenomena ini juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi data penerima bansos. Banyak rekening yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata masih aktif secara ekonomi namun tidak diverifikasi ulang. Hal ini membuka peluang bansos diterima pihak yang tidak tepat sasaran, dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan. —um/aha

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kodiklat TNI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (17/7/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya



Dorong Penyelesaian RUU Kabupaten-Kota

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari menjaring masukan terkait Perubahan undang-undang yang sebelumnya diatur oleh bentuk Republik Indonesia Serikat dan undang-undang sementara maka diubah sesuai UUD 45 dalam konteks penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, menyebutkan bahwa dari total lebih dari 300 daerah, masih tersisa 112 yang belum memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk empat kabupaten di Sulawesi Tenggara: Konawe, Muna, Buton, dan Kolaka.

Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan masukan teknis, tetapi juga menggali aspek historis dan budaya

daerah-daerah tersebut. “Empat kabupaten ini merupakan pilar penting pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sana terdapat kerajaan dan kesultanan yang tidak pernah dijajah, yang menjadi karakteristik khusus daerah ini,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha saat memimpin kunjungan kerja spesifik RUU tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis, (17/7).

Aspek historis ini menjadi perhatian serius karena dianggap mencerminkan kekhususan daerah, yang layak mendapatkan pengakuan dalam RUU yang sedang dibahas. Dibandingkan dengan Yogyakarta yang mendapat status istimewa karena kesultannya, Buton dan kabupaten sekitarnya juga dinilai memiliki legitimasi sejarah serupa. “Kesultanan Buton itu



Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara dengan topik RUU tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kamis, (17/7/2025).

sudah berdiri sejak abad ke-15. Itu warisan peradaban yang tidak bisa diabaikan,” lanjutnya.

Masukan dari Pemerintah Provinsi dan para bupati akan dikumpulkan secara tertulis dan diinventarisasi untuk menjadi bahan rapat pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPR, yang dijadwalkan mulai Senin depan. — **man/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: DEP/ASP

Komisi III DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi Advokat, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Komitmen Perkuat Profesi Advokat

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat profesi advokat di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi Advokat, sebagai bagian dari menerima masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan berkualitas.

“Kami berkomitmen memperkuat profesi advokat.

Hal tersebut dilakukan demi terciptanya hukum yang adil,” kata Habiburokhman, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (21/7). Komitmen ini diharapkan dapat dimaksimalkan dengan adanya RUU KUHAP yang sedang digodok.

Para advokat yang hadir dalam acara tersebut, meskipun kini dikenal sebagai “high profile advokat”, diakui Habiburokhman sebagai pejuang yang membangun karir dari bawah. Mereka dinilai memiliki kontribusi besar dalam membantu masyarakat tanpa perlindungan maksimal dari negara.

Salah satu keprihatinan yang

disoroti adalah keterbatasan peran advokat dalam KUHAP yang lama. “Advokat kalau mendampingi kliennya, bicara pun tidak boleh. Jangankan menyampaikan keberatan, memperjuangkan klien, bicara pun tidak boleh, bahkan kalau posisi klien yang didampingi belum tersangka mendampingi pun tidak boleh. Seringkali seperti itu,” ungkapnya menjelaskan posisi advokat dalam KUHAP lama.

Untuk itu, perbaikan yang diusung dalam RUU KUHAP ini, menurutnya tidak akan mengganggu atau mengurangi kewenangan aparat penegak hukum lainnya. Sebaliknya, pemberdayaan advokat justru akan meningkatkan kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Ia menilai komitmen ini sejalan dengan praktik di negara-negara maju, di mana peran advokat sangat dihormati tanpa mengganggu tugas penegak hukum lainnya. **— bia/aha**



TWA Butuh Renstra yang Jelas

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya restrukturisasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Pundi Kayu Palembang yang saat ini dinilai tidak maksimal. Firman mendorong agar pengelolaan TWA segera diputus (*cut off*) bila tidak mampu memberikan dampak signifikan, dan dialihkan kepada pihak yang lebih siap serta profesional.

“Kalau memang tidak mampu harus di-*cut off*. Dan kemudian dialihkan kepada siapa yang siap untuk mengelola secara profesional. Komisi IV akan memantau rencana kerjanya seperti apa ke depan,” kata Firman usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Palembang, Sumsel, hari Jumat (18/7).



Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di BKSDA Sumsel, Palembang, Sumsel, Jumat (18/7/2025).

Firman menekankan bahwa pengalihan pengelolaan tidak bisa sembarangan, harus ada konsep kerja sama yang jelas antara pemerintah daerah atau pihak swasta, lengkap dengan rekam jejak

dan latar belakang pengelola. Ia menyarankan agar rencana strategis (renstra) jangka panjang selama 30 tahun disusun secara komprehensif, dengan prioritas pada pelestarian hutan.

“Kalau diberikan kepada Pemprov, Pemprov bekerja sama dengan siapa. Dan kalau diberikan ke swasta, swastanya siapa, *background*-nya harus jelas. Mereka harus bikin satu konsep pengelolaan ke depan, dalam kurun waktu 30 tahun itu renstranya seperti apa,” tegasnya.

Menurut Firman, tujuan utama pengelolaan TWA harus menyeimbangkan antara fungsi konservasi dan pariwisata. Ia menolak keras adanya penebangan pohon dalam kawasan tersebut. “Pelestarian kawasan hutan itu yang paling penting. Tidak boleh ada satu pun kayu yang dipotong,” tambahnya. **mun/aha**



FOTO: MUNICH/ASP

Pembenahan Distribusi Lalu Lintas Udara



Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengingatkan pemerintah dan pengelola bandara untuk segera mengantisipasi lonjakan pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta). Ia memproyeksikan bahwa dalam lima tahun ke depan, jumlah

penumpang bisa meningkat hingga lebih dari 10 persen dari kondisi saat ini. Karena itu, ia mendorong perluasan fasilitas bandara dan pemerataan lalu lintas penerbangan antarbandara di Pulau Jawa.

“Bandara ini kan jendela kita kepada dunia luar. Jadi kalau tertib di bandara ini, baiklah nama bangsa ini. Tapi kalau tidak tertib, itu juga menyangkut nama baik negara kita di mata internasional,” ujar Lasarus ketika melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Jumat (11/7).

Lasarus menyebut saat ini jumlah pergerakan penumpang di bandara tersebut telah mencapai 94 juta per tahun, naik lebih dari tiga persen dibandingkan masa sebelum pandemi COVID-19. Dengan laju tersebut, ia mengingatkan bahwa

kapasitas bandara bisa segera jenuh dalam waktu dekat.

“Sekarang sudah terasa *crowded*. Kami akan usulkan, kalau memungkinkan secara lahan, perluasan area terminal harus segera dipikirkan. Ini tanggung jawab Angkasa Pura dan juga Ditjen Udara,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Ia juga mengkritisi minimnya bandara internasional aktif di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jakarta, menurutnya, idealnya memiliki dua atau tiga bandara internasional aktif, bukan hanya mengandalkan Soekarno Hatta. “Halim memang ada, tapi itu terbatas karena sifatnya militer. Praktis kita hanya andalkan (bandara) Soekarno Hatta,” ujarnya.

ica/rdn



Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat (11/7/2025).

Selesaikan Sengketa Pelabuhan Batam Center



FOTO: BALGGYS/ASP

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat menerima cenderamata usai kunjungan spesifik ke Batam.

Dalam kunjungan spesifik ke Pelabuhan Internasional Batam Center, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Andre Rosiade menyoroti serius persoalan sengketa pengelolaan pelabuhan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas layanan publik dan iklim investasi di Batam. Pelabuhan Batam Center merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia, dengan volume penumpang mencapai hampir 2 juta orang per tahun, terutama rute internasional ke Singapura dan Malaysia.

“Kami menemukan adanya sengketa berkepanjangan antara pihak pengelola lama dan baru. Kami menyangkan bahwa Badan Pengusahaan (BP) Batam mencabut izin pengelola sebelumnya secara sepihak, yang kemudian memicu konflik dan penutupan operasional oleh pihak lama,” ungkap Andre usai

pertemuan, di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (18/7).

Sengketa tersebut kini sedang berproses di Mahkamah Agung. Karena itu, Komisi VI mendesak agar penyelesaiannya dilakukan

secara transparan, adil, dan mengedepankan kepastian hukum. Andre mengingatkan bahwa pelabuhan bukan sekadar fasilitas ekonomi, tetapi juga simbol konektivitas dan wajah Indonesia di hadapan dunia internasional.

“Batam Center ini adalah pelabuhan strategis, pintu gerbang utama dari dan ke luar negeri. Kalau sengketa terus berlarut, ini bisa berdampak pada kepercayaan publik, investor, hingga reputasi Indonesia di mata internasional,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Komisi VI juga meminta BP Batam untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang menyangkut kepemilikan atau peralihan pengelolaan aset vital. Keberpihakan pada hukum, kepentingan nasional, dan keberlanjutan layanan publik harus menjadi prioritas utama.

gys/rdn



Setujui Usulan Anggaran Ditjen KPAIL

Komisi VII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAIL) Kementerian Perindustrian pada TA 2025 sebesar Rp 11,965 miliar yang dialokasikan untuk melakukan persiapan pameran industri internasional INNOPROM tahun 2026.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian di Gedung Parlemen,



Komisi VII DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian di Gedung Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (17/7).

Ia mengatakan pihaknya mendukung terselenggaranya Indonesia sebagai *partner country* pada pameran industri INNOPROM di Rusia tahun 2026 dalam rangka promosi industri nasional di tingkat global.

“Dengan disetujuinya penambahan anggaran untuk INNOPROM ini kami berharap pelaksanaannya dapat dipersiapkan sebaik mungkin karena pameran ini membawa nama besar Indonesia dimata dunia,” imbuhnya. **tn/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya





Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7/2025).

Pembangunan Grand El Hajj Harus Tepat Waktu

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengatakan bahwa pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj harus selesai tepat waktu karena jika tidak selesai hingga bulan Desember 2025 di dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak ada dana rehabilitasi untuk pembangunan asrama haji.

"Kita minta kepada KaKanwil dan PPKnya agar mengambil langkah yang cepat mengingatkan kontraktornya agar bekerja secara maksimal, karena jika tidak selesai tepat waktu dalam dana SBSN itu tidak ada dana rehab", katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik

di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7).

Ia melanjutkan, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau (Batam) pembangunan asrama haji menggunakan dana SBSN dan tidak selesai. Anggaran puluhan miliar habis serta bangunan tidak bisa digunakan.

"Hal tersebut yang kami ingatkan kepada Kakanwil dan PPK sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan ini, sehingga mudah-mudahan di akhir 31 Desember 2025 bangunan tersebut mencapai titik 100 persen," kata politisi fraksi Partai Golkar itu.

Jika melihat target tersebut, Ia melanjutkan, maka perlu ditambah pekerjaanya, mungkin dengan memakai tiga *shift* dan menggunakan alat-alat yang canggih sehingga cepat selesai. Barang-barang seperti AC dan sebagainya yang dipesan dari luar negeri agar segera dipesan sesuai dengan spesifikasi.

"Pasalnya sejauh ini pada bulan ke 7 tidak ada kendala pembangunan, jadi jangan sampai pada bulan ke 12 pembangunan belum selesai, untuk itu jika mau pesan barang harus sekarang, pesannya saja butuh waktu dua bulan, belum lagi pemasangannya," pungkasnya. **cas/aha**



Pekerja Difabel Berhak Sejahtera

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyerukan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengawal perlindungan ketenagakerjaan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Seruan ini disampaikannya usai mengunjungi PT Mitra Adi Jaya, perusahaan pengolahan tembakau di Berbah, Sleman, yang mempekerjakan sejumlah penyandang disabilitas.

Arzeti mengaku terharu saat menyaksikan secara langsung para pekerja disabilitas yang tetap produktif dan mandiri meskipun memiliki keterbatasan fisik. Menurutnya, kehadiran mereka di dunia kerja tidak hanya

menunjukkan semangat yang luar biasa, tetapi juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

“Anak-anak kita yang dikatakan disabilitas justru punya kelebihan yang luar biasa. Mereka bisa mandiri, berkarya, dan membantu keluarganya. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berdaya,” ungkap Arzeti, Kamis (17/7).

Ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang setara di dunia kerja. Hal ini dapat



Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina saat kunjungan kerja ke PT Mitra Adi Jaya, di Sleman, Kamis (17/7/2025).

diwujudkan melalui regulasi yang berpihak, fasilitas kerja yang inklusif, serta pengawasan ketenagakerjaan yang berjalan secara konsisten dan tidak terbang pilih.

“Negara harus hadir melalui pengawasan yang adil, fasilitas yang merata, dan regulasi yang inklusif. Jangan sampai masih ada diskriminasi dalam hal perekrutan, penempatan, maupun pemenuhan hak-hak pekerja difabel,” tegasnya.

uf/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Regenerasi Budayawan Butuh Integrasi Pendidikan



Komisi X DPR RI gelar Rapat Kerja bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amaliah menekankan pentingnya pengarusutamaan aspek pendidikan dalam program kerja Kementerian Kebudayaan agar Indonesia dapat melahirkan lebih banyak budayawan di masa depan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7), dalam agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024.

“Jika kita ingin melahirkan banyak budayawan, maka sumber

utamanya adalah pendidikan. Tanpa pengarusutamaan kebudayaan dalam dunia pendidikan, akan sulit menemukan potensi talenta budayawan di masa depan,” ujar Ledia.

Ia menambahkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman sempit mengenai budaya yang hanya diidentikkan dengan seni. Oleh karena itu, Ledia mendorong Kementerian Kebudayaan untuk lebih aktif menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Nampaknya sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan itu menjadi penting, karena masyarakat kita

masih menilai budaya hanya sebatas seni. Padahal dalam undang-undang tersebut disebutkan ada banyak objek pemajuan kebudayaan lainnya,” jelas politisi Fraksi PKS itu.

Ledia juga menyoroti perlunya penguatan indikator kinerja internal Kementerian Kebudayaan, salah satunya melalui capaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan satuan kerja Dirjen Kebudayaan. Menurutnya, capaian ini akan menjadi tolok ukur penting dalam tata kelola kelembagaan ke depan, terutama pasca pemisahan kementerian. **aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Fokus Penguatan Pengawasan dan Infrastruktur



FOTO: MARIO/ASP

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan OJK di Nusantara I Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

keuangan negara,” kata Misbakhun.

Penerimaan terbesar OJK bersumber dari sektor perbankan sebesar Rp6,4 triliun, diikuti sektor pasar modal dan bursa karbon Rp991 miliar, perasuransian dan dana pensiun Rp578 miliar, serta lembaga pembiayaan dan LJK lainnya Rp354 miliar. Sektor inovasi teknologi keuangan dan kripto menyumbang Rp1,4 miliar.

Ketua Panja Penerimaan RKA OJK 2026 Komisi XI, Dolfie Othniel Fredric Palit, menekankan lima poin kesepakatan yang dicapai. Selain menyetujui proyeksi penerimaan OJK, Panja juga mendukung penyelesaian piutang sektor jasa keuangan, optimalisasi pungutan dari perusahaan induk konglomerasi keuangan, serta penggunaan dana secara efisien, transparan, dan akuntabel. **ssb/aha**

Pendanaan OJK 2026 berasal dari proyeksi penerimaan sebesar Rp8,4 triliun serta saldo penerimaan tahun 2025 sebesar Rp5,3 triliun.

Komisi XI DPR RI resmi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2026 dengan total proyeksi penerimaan sebesar Rp13,8 triliun dan pengeluaran Rp11,4 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan OJK di Nusantara I Senayan, Jakarta, Kamis (17/7).

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa pendanaan OJK 2026 berasal dari proyeksi penerimaan sebesar Rp8,4 triliun serta saldo penerimaan tahun 2025 sebesar Rp5,3 triliun. Sumber penerimaan meliputi pencatatan Rp72,5 miliar, pungutan tahunan



Scan QR untuk berita selengkapnya



PLTB Sidrap Berkontribusi Signifikan

Dalam rangka mendukung pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional sebesar 25 persen pada tahun 2030, Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/7).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan keberlanjutan proyek-proyek energi baru terbarukan, sekaligus mendorong komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memperluas

PLTB Sidrap telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi bagian Selatan.

pemanfaatan energi bersih di Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyampaikan bahwa PLTB Sidrap telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi bagian Selatan. Dengan kapasitas produksi sebesar 202,9 megawatt, PLTB ini mampu menerangi kurang lebih 42.000 rumah tangga.

"Kita punya target bauran energi bersih sebesar 25 persen dalam sistem grid nasional pada tahun 2030. Saat ini secara nasional baru tercapai sekitar 13 persen, namun capaian di Sulawesi sudah mencapai 34 persen. Ini tentu menjadi contoh dan capaian yang membanggakan," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut kepada **Parlementaria**.

Menurutnya, tingginya capaian bauran energi di Sulawesi Selatan menjadikan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan kontribusi energi bersih tertinggi secara nasional. PLTB Sidrap sendiri menyumbang hampir 8 persen dari total bauran EBT di wilayah Sulawesi bagian Selatan.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara PLN dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan energi terbarukan. Dony juga menekankan pentingnya eksplorasi lanjutan terhadap wilayah-wilayah potensial yang memiliki kecepatan angin tinggi.

 **go/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komitmen Percepat RUU Masyarakat Adat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Hal itu disampaikannya usai menerima audiensi dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiat menyambut baik dukungan mahasiswa UII terhadap advokasi penguatan masyarakat ada, yang hingga kini belum mendapat kepastian hukum meski telah diperjuangkan selama dua dekade.

“Berdasarkan data yang kita dapat, konflik agraria yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat itu di Indonesia tinggi. Dan sampai



Komisi XIII DPR RI saat menerima audiensi dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta. Senin (21/7/2025).

Kehadiran mahasiswa menjadi energi baru dalam mempercepat pembahasan RUU tersebut yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional

sekarang kan masyarakat adat itu selalu dikalahkan,” ujar Sugiat pada **Parlementaria**, Senin (21/7).

Menurutnya, kehadiran mahasiswa menjadi energi baru dalam mempercepat pembahasan RUU tersebut yang kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode berjalan.

“Kita berharap, dengan kehadiran kawan-kawan mahasiswa ini, bisa mempercepat penyelesaian RUU yang sudah 20 tahun tidak tuntas-tuntas. Tapi yang paling penting bagaimana penguatan masyarakat adat itu terjadi di lapangan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sugiat juga menekankan pentingnya pengawalan pelaksanaan undang-undang di lapangan. Ia mendorong mahasiswa untuk turut terlibat aktif saat terjadi konflik antara masyarakat adat dengan korporasi maupun aparat negara. **we/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Serap Aspirasi dalam Penyusunan RUU PPRT



Ketua Baleb DPR RI Bob Hasan dalam RDPU antara Baleb DPR RI dan Presiden Executive Committee Partai Buruh, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Ketua Badan Legislasi (Baleb) DPR RI Bob Hasan menegaskan komitmen lembaganya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

"*Law is feel*. Ini yang ingin dituangkan dan diakomodasikan ke dalam materi muatan. Kita perlu melakukan penyerapan satu per satu. Kita perlu membangun kerangka," ujar Bob dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Baleb DPR RI dan Presiden Komite Eksekutif Partai Buruh, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (17/7).

Meski begitu, ia mengakui



adanya dilema yang kerap dihadapi Baleb dalam proses legislasi. Ketika rancangan undang-undang disusun dengan cepat, publik menilai prosesnya tergesa-gesa dan tertutup. Namun, ketika Baleb membuka ruang partisipasi

dan mengakomodasi berbagai pandangan, tak jarang justru dianggap lambat.

"Ini dilema yang sedang kami hadapi. Tapi kami tidak akan kendor, dan tidak akan mundur," tegasnya.

Bob menambahkan, saat ini Baleb tengah aktif menyerap aspirasi dari berbagai kampus di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau sivitas akademika dan memastikan bahwa seluruh pemikiran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat benar-benar tertampung dalam penyusunan RUU PPRT.

Dalam forum tersebut, ia juga menginformasikan bahwa Naskah Akademik (NA) RUU PPRT tengah diperbarui. Oleh sebab itu, setiap masukan menjadi catatan penting bagi Baleb. **hal/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: OJI/ASP

Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT, Alien Mus, saat meninjau Rumah Sakit (RS) Siloam Denpasar, Bali, Kamis (17/7/2025).

Apresiasi Layanan RS Siloam Denpasar

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan Rumah Sakit (RS) Siloam Denpasar, Bali. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT, Alien Mus, saat meninjau rumah sakit tersebut, Kamis (17/7).

Dalam kunjungannya, Alien Mus mengaku terkesan dengan mutu layanan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki RS Siloam Denpasar, yang telah mengantongi akreditasi *Joint Commission International* (JCI),

sebuah standar mutu pelayanan kesehatan tingkat global.

“Saya senang sekali karena mendapatkan satu rumah sakit provider yang akreditasinya sudah JCI. Tadi dipaparkan dengan detail layanan unggulannya, mulai ortopedi sampai neurologi dan seterusnya,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Alien menyatakan, RS Siloam Denpasar layak menjadi rumah sakit rujukan bagi para anggota dewan dan keluarganya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia juga menyoroti nilai-nilai yang

dipegang rumah sakit, yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan pasien.

Rumah sakit ini memegang teguh nilai bernama START, yang mengedepankan kepuasan dan kenyamanan pasien selama proses pengobatan. Para tenaga medis, khususnya dokter, dituntut untuk ramah dan informatif dalam memberikan layanan.

“Value START yang mereka miliki bahwa mereka melayani dengan kasih dan mengutamakan kepentingan pasien daripada nilai rupiahnya. Intinya dia menunjukkan itu, ya itu kami anggap pemaparannya tadi cukup jujur,” ujar legislator asal Dapil Maluku Utara itu.

Alien menambahkan, pendekatan holistik yang diterapkan RS Siloam tak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tapi juga psikis. Hal ini membuat pasien merasa lebih nyaman dan teredukasi selama proses perawatan. **oji/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perkuat Kesolidan Komunitas ASEAN

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI turut berpartisipasi dalam ASEAN Inter-Parliamentary

Assembly (AIPA) Caucus ke-16 yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Kerajaan Kamboja, di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/7). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (F-PKS), yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga (F-Partai Golkar), dan Anggota BKSAP Dede Indra Permana Soediro (F-PDI Perjuangan).

AIPA Caucus ke-16 dihadiri oleh delapan anggota parlemen dari negara-negara ASEAN, terkecuali Filipina dan Myanmar. Selain itu, terdapat juga 10 negara pengamat dan mitra pengembangan AIPA, di antaranya Azerbaijan, Bahrain, Parlemen Eropa, Georgia, India, Maroko, Pakistan, Turki, China, dan Timor-Leste.

Dalam agenda kaukus, para anggota parlemen menyampaikan laporan tentang implementasi resolusi yang diadopsi pada Sidang Umum ke-45 AIPA yang berlangsung di Vientiane, Laos, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Mardani menyampaikan progres Indonesia terkait implementasi 21 resolusi AIPA yang terdiri dari berbagai bidang.

"Dalam Resolusi Penguatan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan, UUD 1945 dalam pembukaannya telah mengamanatkan

Indonesia untuk turut serta menciptakan ketertiban dunia

Resolusi Penguatan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan, UUD 1945 dalam pembukaannya telah mengamanatkan Indonesia untuk turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera dalam ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-16 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (15/7/2025).

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Zona Bebas Nuklir di Kawasan Asia Tenggara melalui UU Nomor 9 Tahun 1997, serta meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme melalui UU 5 Tahun 2012," jelas Mardani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (19/7).

Indonesia juga aktif dalam menyelesaikan isu lingkungan global melalui Resolusi Aksi Terpadu dalam mengatasi Permasalahan Plastik, dengan menerapkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang juga mengatur mengenai sampah plastik. ➡ rdn



FOTO: BKSAP/AHA

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Adang Daradjatun Resmi Jadi Wakil Ketua MKD



FOTO: MARIO/ASP

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan Adang Daradjatun sebagai Wakil Ketua MKD DPR RI, menggantikan rekan se-fraksinya Habib Aboe Bakar Alhabsyi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menetapkan Adang

Daradjatun sebagai Wakil Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI, menggantikan rekan se-fraksinya Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Penetapan ini dilaksanakan dalam rapat internal MKD DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Usai penetapannya, Adang Daradjatun menyampaikan bahwa MKD DPR RI akan terus menjalankan tugas dan fungsi menjaga kehormatan serta etika anggota DPR RI baik di lingkungan parlemen maupun dalam kehidupan

Dengan terpilihnya Adang Daradjatun sebagai Wakil Ketua MKD DPR RI yang baru, pengawasan terhadap perilaku dan etika anggota DPR RI diharapkan dapat terus berjalan optimal

sehari-hari. “Pada dasarnya intinya ya, bahwa MKD akan selalu mengawasi tingkah laku, sikap dan sebagainya anggota DPR, baik itu di lingkungan gedung DPR sendiri maupun di luar gedung,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen MKD DPR RI dalam

membuka ruang pengaduan kepada masyarakat atas perilaku anggota DPR RI yang dinilai melanggar etika. “Kepada masyarakat yang mengetahui tingkah laku (Anggota DPR) dan sebagainya yang kira-kira tidak dalam konteks etika kurang, misalnya ada masalah-masalah di jalanan atau di mana pun, silakan untuk datang ke loket pengaduan MKD,” ajak Politisi Fraksi PKS ini.

Dengan terpilihnya Adang Daradjatun sebagai Wakil Ketua MKD DPR RI yang baru, pengawasan terhadap perilaku dan etika anggota DPR RI diharapkan dapat terus berjalan optimal dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif. ➡ **rth,bia/aha**



Payung Hukum Pengelolaan Ruang Udara



FOTO: HAL/AHA

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Amelia Anggraini, saat memimpin Kunjungan Kerja Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/7/2025).

DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara sebagai respons atas belum adanya regulasi menyeluruh yang mengatur pemanfaatan ruang udara nasional. Saat ini, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dan sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta disharmoni antar-lembaga.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Amelia Anggraini, menilai kondisi ini perlu segera ditangani melalui pembentukan payung hukum yang komprehensif. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/7).

“Ketidakselarasan regulasi berdampak pada munculnya konflik dan permasalahan, seperti tumpang tindih antara wilayah sipil dan militer, pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing, hingga minimnya koordinasi

dalam kegiatan olahraga dirgantara, penggunaan drone, serta penanggulangan asap lintas wilayah,” ujar Amelia.

Ia menjelaskan bahwa beberapa undang-undang yang selama ini mengatur ruang udara tersebar dalam peraturan seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, hingga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masing-masing mengatur dari sudut kepentingan sektoralnya, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional.

Maka dari itu, DPR RI mendorong penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara agar ruang udara Indonesia dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan, baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, maupun pengawasan. **hal/rdn**



FOTO: HIRA/ASP



Relokasi Masyarakat TN Tesso Nilo Harus Cermat



FOTO: PUNTHO/ASP

Anggota BAM DPR RI Obon Tabroni dalam pertemuan dengan Gubernur Riau dan jajaran pemerintah kabupaten/kota serta TNI-Polri, Kamis (10/7/2025).

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Riau dan jajaran pemerintah kabupaten/kota serta TNI-Polri terkait perlindungan hak hidup warga desa yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dalam kesempatan itu, Anggota BAM DPR RI Obon Tabroni menegaskan bahwa proses relokasi masyarakat harus dijalankan dengan cermat agar tidak memicu konflik baru, baik secara vertikal maupun horizontal.

“Dari persoalan tentang ada rencana relokasi atau transmigrasi mandiri atau segala macam. Prinsipnya bahwa hutan ini kita akan kembalikan, itu penting. Tapi yang paling penting juga adalah jangan sampai juga ada konflik di bawah, baik konflik vertikal ataupun konflik horizontal,” ujar Obon saat wawancara dengan **Parlementaria**

dan awak media usai acara di Kantor Gubernur, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (10/7).

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa dalam proses pengembalian fungsi

hutan, yang harus diperhatikan adalah nasib warga yang telah lama bermukim di kawasan TNTN dan yang tergolong mandiri untuk perlu dilindungi agar tidak menjadi korban dalam proses penertiban kawasan konservasi.

“Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, pekerja-pekerja yang dibawa oleh cukong-cukong bukan tanggung jawab dari pemerintah tentu, tapi penduduk yang sudah memang ada di sini yang 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun dan yang lainnya, itu yang harus kita pastikan mereka tidak terlalu menjadi dampak,” tandas Obon.

Lebih lanjut, Obon juga menyatakan bahwa meski BAM DPR RI tidak secara langsung melakukan verifikasi ke lapangan, namun akan terus berkoordinasi dengan komisi dan fraksi lain di DPR RI agar persoalan ini mendapat perhatian menyeluruh dan solusinya bersifat lintas sektor. **pun/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso bersama tim saat kunjungan kerja spesifik mengapresiasi program pembinaan berbasis budaya lokal di Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman, Jumat (18/7/2025). Komisi XIII menilai pendekatan ini memperkuat proses rehabilitasi warga binaan secara lebih manusiawi dan kontekstual.
FOTO: BLF/AHA



TNR
PARLEMEN

Perempuan Parlemen

SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)



youtube @tvrparlemen



@tvrparlemen



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri